

## Bobby Minta Perusahaan Daerah yang Untung Bantu Medan Zoo

**MEDAN (IM)**- Kondisi Medan Zoo atau Kebun Binatang Medan saat ini sangat memprihatinkan, karena hampir 70 persen kandang rusak, pakan ternak utang 4 bulan, hingga gaji karyawan yang menunggak sejak Agustus 2023.

Terkait persoalan ini Wali Kota Medan, Bobby Nasution berjanji akan mencari solusi untuk memperbaiki kondisi Medan Zoo. Bobby mengatakan telah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan, yang menangani Medan Zoo untuk menyelesaikan tersebut.

“Kita sudah disampaikan juga beberapa aspek tentang Medan Zoo-nya, baik itu tentang satwa di dalam dan juga tentang Medan Zoo secara keseluruhan ini step-step-nya mudah-mudahan terus kita jalani langkah-langkah dilakukan Medan Zoo, kita perbaiki secara maksimal, tapi sekarang kita utamakan satwanya dulu,” ujar Bobby saat ditanya awak media di kantornya, Rabu (10/1) malam. Menantu Presiden Joko Widodo ini mengatakan saat ini fokus utama mereka lebih kepada pemenuhan kebutuhan pakan satwa dan gaji karyawan Medan Zoo. Dia meminta unit usaha dari PUD Pembangunan yang menghasilkan keuntungan, agar menyuntikkan dana ke Medan Zoo.

“Kita lihat memang dari beberapa (5 unit usaha PUD Pembangunan), hanya satu usaha yang profit-nya bisa menutupi kegiatan usaha yang lain,

Ini yang saya sampaikan dari profit itu diutamakan pertama adalah satwa di sana dan juga para pegawainya,” ungkap Bobby.

Sejauh ini, opsi penyuntikan dana dari Pemko Medan ke Medan Zoo memang belum dilakukan. Bobby masih menganjurkan pihak PUD Pembangunan atau Medan Zoo, menjalin kerja sama dengan pihak swasta, untuk pendanaan pakan hewan dan gaji pegawai.

“Dari Pemko pastinya kalau kita bilang suntikan dana dari Pemko itu, kan berarti harus (ada) penambahan penyertaan modal kembali. (Harus) disetujui DPRD dan segala macam, nah itu opsi memang belum ada. Dan opsi ini yang terus kita sampaikan kepada para BUMD itu, membangun kerja sama,” ungkapnya.

Disinggung kemungkinan merelokasi atau menutup Medan Zoo karena tempatnya tidak layak, Bobby tidak menjawabnya secara gamblang. Dia menyatakan masih mengkaji dari berbagai aspek. “Pasti ada beberapa opsi, kita buat tentunya tadi harus melihat segala aspek. Opsi tetap dibuka, opsi ditutup, opsi relokasi. Pastinya opsi-opsi yang sudah ada kita list, nanti opsi mana yang paling tepat itu yang kita pilih,” ujarnya. ● **pra**



IDN/ANTARA

### PENGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BANDUNG

Petugas membantu warga yang akan melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui aplikasi di Kantor Disdukcapil Kota Bandung, Jabar, Kamis (11/1). Pemkot Bandung melalui Disdukcapil mencatat, sebanyak 48.981 masyarakat telah melaliam aktivasi identitas kependudukan digital.

## Pemerintah Kota Bandung Luncurkan Penggunaan KKPD

**BANDUNG (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Pendopo Kota Bandung, Kamis (11/1).

Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah oleh pemerintah daerah, sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat. Kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyebutkan, penggunaan KKPD akan didorong digunakan di seluruh perangkat daerah. Pada tahap pertama penggunaan KKPD untuk 10 perangkat daerah sebagai pilot project.

“Tahun ini tidak hanya 10 perangkat daerah, lebih dari itu perangkat daerah lainnya juga harus menerapkan hal yang sama,” kata Bambang Tirtoyuliono.

Ia menerangkan, penggunaan KKPD untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien serta memperoleh kesamaan pemahaman seluruh organisasi terkait pentingnya peningkatan digitalisasi.

“Esensi dari KKPD yang pertama tentunya lebih akuntabel, transparan, lebih cepat, birokrasi tidak terlalu panjang dan yang terpenting potensi terjadinya fraud itu bisa kita minimalis,” ucapnya.

Pihaknya meminta penggunaan kartu kredit pemerintah ini dapat meningkatkan serapan anggaran. Selain itu, perangkat daerah yang menyelenggarakan KKPD ini harus mengawasi penggunaannya.

Tak hanya itu, dalam penggunaannya harus dapat melibatkan produk lokal

terutama mengadakan belanja barang jasa.

“Termasuk di antaranya melibatkan produk lokal dan tingkatkan TKDN sebagaimana yang diatur yang ada di dalam berbagai macam edaran yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Agus Slamet Firdausy mengatakan, pelaksanaan penggunaan kartu kredit pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta Peraturan Wali Kota nomor 23 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan pelaksanaan KKPD dalam pelaksanaan APBD tertanggal 25 Juli 2023.

Terdapat 10 perangkat daerah sebagai pilot project penggunaan KKPD yaitu, inspektoral daerah, badan keuangan dan aset daerah, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, badan perencanaan pembangunan oenelitian dan pengembangan, badan pendapatan daerah, dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah, dinas komunikasi dan informatika, bagian umum dan perkapeng sekretariat daerah, kecamatan antapani, dan kecamatan arcamanik.

“Untuk triwulan pertama penggunaan KKPD dilaksanakan oleh BKAD dan selanjutnya secara bertahap dilaksanakan oleh 9 perangkat daerah lainnya sampai dengan akhir tahun 2024,” ucapnya. ● **pra**

# 8 Nusantara



Suasana Diskusi Publik yang digelar JJB, Kamis (11/1).

## Program Beasiswa Panca Karsa Dapat Apresiasi Namun Perlu Dievaluasi

Program Panca Karsa dianggap baik adalah Beasiswa Panca Karsa atau program Panca Cerdas, itu harus ditindaklanjuti walaupun nanti ada evaluasi dengan beberapa metode tetap, agar program Beasiswa Panca Karsa lebih sempurna lagi, kata Dosen Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Desi Hasbiyah.

**CIBINONG (IM)**- Program Beasiswa Panca Karsa diapresiasi Dosen Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda Desi Hasbiyah.

“Program Panca Karsa yang saya anggap baik itu Beasiswa Panca Karsa atau program Panca Cerdas, itu harus ditindaklanjuti walaupun nanti tetap ada evaluasi,” kata Desi Hasbiyah.

Desi Hasbiyah menuturkan bahwa evaluasi dengan beberapa metode tetap harus dilakukan, agar program Beasiswa Panca

Karsa lebih sempurna lagi. “1.200 beasiswa Panca Karsa yang dikerjakannya dengan 57 kampus amat sangat membantu mahasiswa yang ekonomi keluarganya lemah, tinggal nanti disempurnakan oleh kepemimpinan kepala daerah selanjutnya misal mahasiswa tersebut bisa dipekerjakan oleh Pemkab Bogor,” tuturnya.

Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) menggelar diskusi publik perdananya, yang dilaksanakan di halaman Cibinong Situ Plaza, Kabupaten Bogor, pada

Kamis (11/1).

Acara itu dihadiri oleh Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor yang sekaligus Calon Bupati (Cabup) Bogor usungan Partai Golkar, Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, Staf Ahli Ekbang Setda, Deni Humaedi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor, Shinta Dec Checwati, Dosen Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Dr. Desi Hasbiyah, kalangan aktivis mahasiswa Rumpin, ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor hasil Musdalub lalu, yakni Wahyu Chaniago, dan tamu undangan yang dipandu langsung oleh Nurholis Fardilah, Host sekaligus moderator Diskusi Publik tersebut.

Dalam paparannya, nara sumber Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Dr. Desi

Hasbiyah, menilai secara umum capaian visi misi slogan Panca Karsa, secara tagline sangat membumi. namun secara substantif masih sangat subyektif.

Sebab capaian Bogor Cerdas, Maju, dan berkeadaban secara umum belum sampai kepada masyarakat.

Namun tagline ini, sangat mudah pengucapan dibanding dengan tagline lain di Kabupaten Bogor.

“Saya akui untuk tagline cukup mengena dibanding dengan tagline lain misalnya Bogor Tegar, Proyoga dan lainnya,” ujarnya.

Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor, Shinta Dec Checwati memaparkan secara umum visi misi Bupati dan Wakil Bupati sudah sesuai rol model. Terlepas kekurangan yang perlu disempurnakan oleh pemimpin mendatang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Bogor, Suryanto mengungkapkan secara umum visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sudah sesuai, tapi

juga diakui, belum sempurna capaian itu, perlu disempurnakan lagi kedepannya.

“Visi dan misi Panca Karsa, telah tercapai sesuai slogan Panca Karsa, Bogor cerdas, sehat, daya saing dan berkeadaban,” ujar Suryanto.

Sementara Ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo, menganggap capaian Panca Karsa, sebagaimana dipaparkan dalam refleksi Bupati akhir tahun tercapai targetnya.

Namun dia mempertanyakan parameter visi dan misi Panca Karsa apakah sudah mencapai target.

Hal lain disampaikan Calon Bupati (Cabup) Bogor usungan Partai Golkar, Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Dia merasa heran saat melakukan survei pada saat dijabat Bupati Bogor Ade Yasin sekitar 65 persen.

Anehnya saat dijabat Bupati Iwan Setiawan, angka kepuasan publik blokk jadi 40 persen.

“Nilah survey yang saya lakukan secara independen,” kata Ade Jaro. ● **gio**

## DPRD Kab. Belitung Timur Perkuat Sinergi dengan Diskominfo Kab. Bogor

**BOGOR (IM)**- Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan komunikasi publik dan pengelolaan radio melalui UPT Radio, serta penyebarluasan informasi melalui videotron di wilayah kecamatan dan tempat strategis.

“Semoga informasi yang kami berikan bisa mendorong kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, begitu pun sebaliknya. Sharing informasi ini adalah salah satu wadah untuk sama-sama belajar untuk saling membangun ke arah yang lebih baik satu sama lainnya,” ungkap Sekdis Kominfo.

Kemudian, Perwakilan Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur, Husaini Rasid mengungkapkan, beberapa hal yang didiskusikan pada sharing

informasi ini salah satunya mengenai publikasi dan pengelolaan informasi yang dilakukan di Kabupaten Bogor.

Terlebih Diskominfo Kabupaten Belitung Timur belum lama didirikan artinya ada pengalaman yang lebih dalam pengelolaan informasi yang dilakukan oleh jajaran Diskominfo Kabupaten Bogor.

“Melalui kegiatan ini kami bisa sharing apa sudah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bogor dan apa yang belum kita lakukan, kami akan coba diterapkan di Kabupaten Belitung Timur tentunya untuk mengoptimalkan pengelolaan publikasi informasi agar bisa diketahui oleh masyarakat luas,” terang Husaini. ● **gio**



Optimalkan Pengelolaan Informasi, Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur, perkuat sinergi dengan Diskominfo Kabupaten Bogor.

## Dishub Bogor dan Tangerang Rapat Bahas Operasi Gabungan Truk Tambang

**BOGOR (IM)**- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar rapat bersama. Rapat membahas penanganan kendaraan tambang di wilayah Parungpanjang bakal rampung pada akhir Januari. Hal itu diungkap setelah dia meninjau lokasi pembangunan.

“Hari ini kami kembali turun ke wilayah untuk memastikan progres pembangunan kantong parkir angkutan tambang, sedang dalam proses yang saat ini sudah progresnya di kisaran 60%,” kata Asmawa, Senin (8/1).

“Artinya tidak menunggu lama, insya Allah paling lambat akhir Januari sudah bisa digunakan kantong parkir tersebut. Itu adalah salah satu upaya ikhtiar kami dalam waktu jangka pendek,” sambungnya.

Menurut dia, hal itu sudah sesuai kewenangannya. Sebab, lanjut Asmawa, bicara mengenai tambang itu, banyak pihak yang terlibat, bukan hanya Kabupaten Bogor, tapi juga ada pihak provinsi dan nasional.

“Hari ini kita cek langsung ke lokasi kantong parkir yang mudah-mudahan mulai besok pemadatan sudah bisa digunakan dalam rangka pembatasan jam operasional angkutan tambang,” tegasnya. ● **gio**

“Salah satu tanggapan positif dari Tangerang itu kita bikin